

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Asyhadie, Zaeni. Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Edisi Kelima. Cetakan Keempat. (Yogyakarta: Liberty, 2007)
- Radjab, Abi M. Hukum Perizinan. (Bandung: Kalem Media, 2015).
- Raharjo, Handri. Hukum Perusahaan. (Yogyakarta: MediaPressindo, 2012).
- Sidabalok Janus. Hukum Perusahaan: Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia. (Bandung: Nuansa Aulia, 2012)
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji. Penelitian Hukum Normatif. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: UI-Press, 1996).
- Soemitro, Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, (Bandung: Alfabeta, 2018).
- Widjaya, I.G. Rai. Hukum Perusahaan dan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan di Bidang Usaha. (Jakarta: Kesaint Blanc, 2003)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pearturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- Peratuan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 Tentang
Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

JURNAL DAN SKRIPSI

- Al'afghani, Mohamad Mova. 2021. Konsep Regulasi Berbasis Risiko: Telaah Kritis Dalam Penerapannya Pada Undang-Undang Cipta Kerja Risk Based Regulation: Critique to Its Adoption in the Job Creation Law. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, 68
- Ariani, Ni Luh Ristha dan Made Suksma Prijandhini Devi Salain. 2014. Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang Berbentuk Bukan Perseroan Terbatas (PT). Kertha Semaya. Universitas Udayana. Vol.2(4).
- Fitriani, Rini. 2017. Aspek Hukum Legalitas Perusahaan atau Badan Usaha dalam Kegiatan Bisnis. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Vol. 12(1).
- Harahap, Yuliana Duti, Budi Santoso, dan Mujiono Hafidh Prasetyo. 2021 Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan Serta Tanggung Jawab Hukum Pemeagang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, Notarius, Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Vol.14(2)
- Izhandri, Shandi dan Dessy Agustina Harahap. 2019. OSS dan Perkembangannya di Indonesia. Seminar Nasional Kenotariatan. Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara. <https://mkn.usu.ac.id/images/11.pdf>
- Kusmanto, H. & Warjio (2019). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial, 11 (2): 320-327.
- Mukhammad, Bahir. 2021. Pelaksanaan Perizinan Berbasis Risiko Pasca Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Nalar Keadilan* Vol. 1(2)
- Yusri, 2014, Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Perspektif Keadilan Ekonomi, *Jurnal Ilmu Hukum*. Universitas Syiah Kuala. Vol. 16(1).

WEBSITE

- Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden. Presiden Sampaikan Upaya Pemerintah dalam Pemulihan Dunia Kerja yang Berorientasi pada Manusia. 2022. <https://covid19.go.id/id/p/berita/presiden-sampaikan-upaya->

[pemerintah-dalam-pemulihan-dunia-kerja-yang-berorientasi-pada-manusia](#)

DPMPTKP1. 2022. NIB Punya Peran Penting Naikkan Kelas UMKM.
<https://dpmpt.kulonprogokab.go.id/detil/1378/nib-punya-peran-penting-naikkan-kelas-umkm>.

DPMPTSP Kabupaten Cianjur. 2021. Catat! Ini Kriteria Pelaku Usaha yang Wajib Laporm LKPM. <https://dpmptsp.cianjurkab.go.id/post/read/230/catat-ini-kriteria-pelaku-usaha-yang-wajib-laporm-lkpm.html>

DPMPTSP Provinsi Banten. Apa Saja Tugas dan Fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). 2021.
<https://dpmptsp.bantenprov.go.id/Berita/topic/921>

DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah. 2020. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
[https://web.dpmptsp.jatengprov.go.id/p/313/laporan_kegiatan_penanaman_modal_\(lkpm\)](https://web.dpmptsp.jatengprov.go.id/p/313/laporan_kegiatan_penanaman_modal_(lkpm)).

FFA – Humas Kemensetneg. 2022. UU Cipta Kerja Percepat Proses Pembangunan Nasional.
https://setneg.go.id/baca/index/uu_cipta_kerja_percepat_proses_pembangunan_nasional#:~:text=Lahirnya%20UUCK%20merupakan%20langkah%20terobosan,menciptakan%20keadilan%2C%20dan%20kesejahteraan%20rakyat

Kementerian Investasi/BKPM. Pemerintah Permudah Perizinan Bagi Pemilik UMKM. <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/pemerintah-permudah-perizinan-bagi-pemilik-umkm>

KITADIGI. Keuntungan Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Bagi Pelaku UMKM. <https://kitadigi.com/keuntungan-online-single-submission-oss-berbasis-resiko-bagi-pelaku-umkm/>

Mariska. 2023. Risiko Memiliki Bisnis Tanpa Legalitas.
<https://kontrakhukum.com/article/risiko-memiliki-bisnis-tanpa-legalitas/>

Prakoso, Jaffry Prabu. 2023. Pentingnya Legalitas Bagi UMKM, Berikut Manfaatnya. <https://bisnisindonesia.id/article/pentingnya-legalitas-bagi-umkm-berikut-manfaatnya>.

Prasetya, Agung. 2023. Mengenal Program Pembinaan UMKM Kemenkeu Satu Tahun 2023.
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15879/Mengenal-Program-Pembinaan-UMKM-Kemenkeu-Satu-Tahun-2023.html>

Sistem OSS. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020.
<https://oss.go.id/informasi/kbli-berbasis-risiko>

Sistem OSS. Perizinan UMK Risiko Rendah dan Menengah Rendah – Badan Usaha. <https://oss.go.id/panduan/detail/635970086345c7d71a81449b>

UKMINDONESIA.ID. Perseroan Perorangan (PT Perorangan). <https://ukmindonesia.id/baca-izin/perseroan-perorangan-pt-perseorangan/>

Wahyudi, David. 2020. Tujuan Dibentuknya Undang-Undang Cipta Kerja. <https://tribrataneews.bengkulu.polri.go.id/tujuan-dibentuknya-undang-undang-cipta-kerja/>.

Wahyuni, Willa. 2022. Alasan Hukum Pelaku Usaha Wajib Laporkan LKPM. <https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-hukum-pelaku-usaha-wajib-lapor-lkpm-lt622b2c9de215f/?page=2>